

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, selalu terdorong untuk hidup bermasyarakat atau berkelompok,¹ dengan mengaktualisasikan dirinya untuk menemukan jati diri atau identitas masing-masing. Dalam proses ini, setiap orang membutuhkan bantuan dan partisipasi orang lain. Hal ini bukan untuk menjadi sama seperti orang lain, tetapi justru untuk menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain.

Setiap orang apabila dibandingkan antara satu dengan yang lain, akan terlihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang memiliki keinginan, kehendak, kemauan, pikiran, pendapat, kebutuhan, sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda. Dalam kondisi bervariasi yang bersifat kodrati ini, manusia dalam mewujudkan kehidupan bersama perlu saling mengenal dan saling menghargai, dan akhirnya perlu saling menolong.²

Akan tetapi, di antara perbedaan tersebut terdapat kesamaan yang menjadi motivasi untuk membentuk suatu kelompok atau organisasi. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan kesamaannya itu sehingga mencapai tujuan bersama.³ Demi efisiensi kerja dalam upaya mencapai tujuan dan mempertahankan hidup bersama, diperlukan bentuk kerja kooperatif

¹ Q.S. *al-Hujurat* (49): 13.

² Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 8.

³ *Ibid.*

yang perlu diatur dan dipimpin.⁴ Oleh karena itu, diperlukan seorang pemimpin dalam kelompok tersebut.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia dibebani tugas untuk memakmurkan bumi.⁵ Tugas yang disandangnya ini menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin (khalifah).⁶ Setiap orang harus memimpin –dimulai dari- dirinya sendiri, dengan berbuat amal kebajikan bagi dirinya sendiri, orang lain (masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa) agar mencapai tujuan hidupnya berupa *keselamatan*, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak. Setiap manusia harus mengendalikan dirinya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai makhluk Allah yang memikul kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas segala tingkah laku dan perbuatannya selama hidup di muka bumi.

Dalam masalah kepemimpinan, Nabi Muhammad saw. menyatakan :

Ketahuiilah, bahwa kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap pimpinannya itu. Maka imam adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pimpinannya (rakyatnya). Seorang lelaki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap mereka. *Seorang istri (wanita) adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadapnya.* sedangkan seorang hamba (budak) adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan bertanggung jawab terhadapnya. Ketahuiilah, kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap pimpinannya.⁷

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam posisi dan status apapun juga, manusia sebagai pribadi maupun sebagai umat, tanggung jawab sebagai

⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2.

⁵ Q.S. *al-Baqarah* (2): 30.

⁶ Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang menunjuk kepada arti pemimpin, di antaranya *Khalifah*, *Imam* dan *Amir*.

⁷ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fa, *Sahih al-Bukhari*, jilid V (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 1988.

pemimpin tidak dapat dielakkan. Apabila tanggung jawab ini ditunaikan, maka akan menjadikannya sebagai orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, apabila diabaikan, maka ia termasuk orang-orang yang merugi.⁸

Tanggung jawab ini akan semakin berat, apabila seseorang menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab ini menjadi berat, karena hakikat kepemimpinannya memiliki dua dimensi. *Pertama* adalah pertanggungjawaban yang harus disampaikan pada orang-orang yang dipimpinnya. *Kedua* adalah pertanggungjawabannya kepada Allah tentang kesungguhan dan kemampuannya dalam mengikuti serta menjalankan petunjuk Allah dan keteladanan Nabi Muhammad dalam memimpin. Dua dimensi ini akan berpadu menjadi satu kesatuan, apabila tanggung jawab yang kedua tersebut telah ditunaikan secara baik semata-mata karena Allah swt., maka secara pasti dimensi pertama juga terpenuhi.⁹ Dengan demikian, jelas bahwa kepemimpinan berkenaan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan secara horizontal dengan sesamanya (*habl min al-nas*).

Sosok pemimpin yang bisa memenuhi dua dimensi inilah yang diharapkan ada pada setiap pemimpin pada wilayah terkecil hingga terbesar, yaitu sebuah negara. Akan tetapi kenyataan yang terjadi, tidak semua pemimpin mampu memenuhinya. Ada pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk bahkan ada pula pemimpin yang abnormal.¹⁰

⁸ Hadari Nawawi, *op.cit.*, h. 10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kartini Kartono, *op.cit.*, h. 163.

Kepemimpinan dalam dunia Islam dikenal dalam beberapa istilah, *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk* dan *ri'asah*. Di antara para ulama, ada yang menyamakan istilah-istilah ini dan ada pula yang membedakannya.¹¹ Dalam menyebut pemimpin dalam pemerintahan (kepala negara), istilah khalifah, imam dan amir yang sering digunakan.¹²

Masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan masalah penting dan menarik. Perselisihan terbesar di kalangan umat Islam yang terjadi pasca wafatnya Nabi saw. adalah dilatarbelakangi oleh masalah ini. Perselisihan masalah kepemimpinan ini telah mengakibatkan pertumpahan darah dalam Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing pihak yang berseteru saat itu mengaku bahwasanya orang pilihan dari golongannya yang berhak menduduki kursi kepemimpinan umat Islam.

Seorang pemimpin adalah tampuk kekuasaan. Pemimpinlah yang memerintah dan memutuskan segala perkara yang berada dalam wilayahnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila di antara mereka baik secara individu maupun golongan saling berebut tahta tersebut. Namun tidak semua dari mereka mempunyai niat baik dalam hal ini. Mereka yang berniat busuk hanya ingin memerintah sesuka hati demi memuaskan hawa nafsu mereka yang tidak pernah habis. Akibatnya, rakyat yang dipimpinlah menjadi “korban tak berdosa”.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]), h. 3; M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 346.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 32.

Salah satu hadis sahih riwayat Muslim yang membicarakan tentang kepemimpinan dalam pemerintahan (*al-Imarah*) dan menyebut pemimpin dengan istilah *imam* (*A'immah*), menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyebutkan ciri-ciri seorang pemimpin yang baik dan yang buruk. Redaksi hadis ini adalah sebagai berikut.¹³

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَرَّازَةَ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرْظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَسِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ۖ

Hadis di atas secara implisit menyebutkan bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan baik jika mampu menciptakan suasana saling mendukung antara kedua belah pihak yaitu antara pemimpin dan yang dipimpin yang didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi. Suasana seperti ini dapat menjadi modal awal yang sangat berpengaruh positif dalam mewujudkan tujuan bersama.

¹³ Hadis ini terdapat dalam kitab *Sahih Muslim*, lihat : Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi (selanjutnya disebut Muslim), *al-Jami' al-Sahih*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 24; Yahya bin Syaraf al-Nawawi (selanjutnya disebut al-Nawawi), *Sahih Muslim: Syarh al-Imam al-Nawawi*, jilid VI, juz XII (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 245; Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani (selanjutnya disebut al-Hasani), *al-Manhaj al-Latif fi Usul al-Hadis al-Syarif* ([t.k.]: [t.p.], [t.t.]) h. 98-99; CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Produksi Sakhr, tahun 1991, edisi 1.2. Hadis ini bernilai sahih berdasarkan pendapat al-Albani, al-Suyuti dan al-Bagawi, lihat: Muhammad Nasir al-Din al-Albani (selanjutnya disebut al-Albani), *Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadah al-Fath ai-Kabir*, jilid II (Beirut: al-Maktab al-Islami, [t.t.]), h. 619; Jalal al-Din 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti (selanjutnya disebut al-Suyuti), *a l-Jami' al-Saghir fi Ahadis al-Basyir al-Nair*, jilid II ([t.k.]: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 8; Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi (selanjutnya disebut al-Bagawi), *Syarh al-Sunnah*, jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 302-303.

Sebaliknya, seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang buruk, jika suasana yang terbangun di masa kepemimpinannya bernuansa negatif, yaitu rasa saling membenci bahkan melaknat. Kondisi demikian tentunya dapat menimbulkan dampak negatif dalam proses perjalanan roda kepemimpinannya yang dapat merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak, yaitu ketertindasan yang biasanya terjadi pada kalangan rakyat yang dipimpin.

Pernyataan Nabi tentang kriteria buruk seorang pemimpin tentu wajar jika ditanggapi dengan pertanyaan oleh para sahabat: apakah mereka boleh menumbangkan pemimpin yang dimaksud Nabi. Yang menjadi persoalan adalah jawaban Nabi atas pertanyaan ini yaitu kata “tidak” yang diikuti dengan syarat bahwa pemimpin tadi masih menegakkan (mendirikan) shalat. Hal ini menandakan bahwa pemimpin tersebut masih berhak untuk ditaati. Mengapa Nabi mensyaratkan adanya penegakan shalat untuk menentukan apakah pemimpin yang buruk tersebut boleh ditentang (ditumbangkan) atau tidak? Dalam pernyataan Nabi itu tentu mengandung makna mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan seseorang dengan shalat? Lalu apakah makna tersebut? Padahal seorang pemimpin yang membenci bahkan melaknat rakyatnya dan begitupun sebaliknya dengan sikap rakyat terhadapnya, sangat tipis kemungkinannya untuk bersedia dan mampu menciptakan kestabilan dan kesejahteraan rakyatnya. Apakah shalat dalam hal ini merupakan simbol dari seorang pemimpin yang baik?

Makna atau maksud sesungguhnya yang ditemukan dari sabda Nabi ini, diharapkan dapat memberi pedoman dan arahan bagi kepemimpinan umat Islam

untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi bahwa kemunduran umat Islam –sejak Abad Pertengahan- disebabkan oleh kemunduran dalam hal kepemimpinan akibat kesalahpahaman dalam memahami bagaimana sikap dan pribadi seorang pemimpin yang dimaksud oleh Nabi sebagai suri tauladan terbaik bagi umat Islam.¹⁴

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an sekaligus penjelas al-Qur'an¹⁵ yang dapat menjadi pegangan hidup umat manusia khususnya umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seorang Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu, yaitu memerintah ataupun melarang sesuatu tanpa ada tujuannya. Semua pernyataan beliau pasti mempunyai alasan dan tidak terlepas dari faktor situasi sosio-historis yang ada pada masyarakat masa Nabi. Dengan demikian, hadis tersebut harus diinterpretasi untuk memperoleh petunjuk Tuhan yang tersembunyi dalam sabda Nabi secara tepat. Oleh karena itu, berbagai pertanyaan berkenaan dengan hadis tentang seburuk-buruk pemimpin selama menegakkan shalat di atas harus ditemukan jawabannya, sehingga kesamaran yang dapat menyebabkan perselisihan karena kesalahpahaman dalam interpretasi teks agama di antara umat Islam menjadi jelas dan permasalahan dapat teratasi.

Permasalahan sebenarnya tidak berhenti sampai pemahaman *matn* hadis saja, namun akan berlanjut ketika normativitas hadis harus dihadapkan dengan realitas

¹⁴ Q.S. *al-Ahzab* (33) : 21.

¹⁵ Fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai *bayān mutabī*, *bayān mulazim* dan *bayān tadammun*. Lihat: Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), h. 379-381; Muhammad 'Adib Salih, *Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*, jilid I (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1984), h. 31-42.

dan tuntutan historisitas perkembangan zaman. Masalah ini akan bertambah karena sebuah teks atau *matn* hadis bukanlah sebuah narasi yang berbicara dalam ruang hampa sejarah, *vacum historis*¹⁶, melainkan di balik sebuah teks atau *matn* sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan ketika seseorang ingin memahami dan merekonstruksi makna sebuah hadis sehingga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan humanitas kontemporer.

Jika dihadapkan dengan kondisi kekinian, yaitu pada realitas kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut? Ketika ada pemimpin yang berkualitas baik, sedikit baik, ada pemimpin buruk, sedikit buruk bahkan pemimpin abnormal yang sakit secara sosial –yang egoistis, overkompensatoris, sadistis, maha serakah, kejam, merajalela, neurotis, koruptif dan pasti akan menyebarkan penyakitnya serta menimbulkan banyak kepedihan dan kesengsaraan di kalangan luas, bagaimana konsekuensi yang terjadi jika dilihat melalui “kacamata” hadis ini? Terlebih lagi melihat jumlah pemimpin abnormal ini semakin meningkat pada zaman sekarang terutama di Indonesia.¹⁷ Upaya kontekstualisasi ini dilakukan untuk menghidupkan kembali "ruh" hadis dalam segala dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan manusia, sehingga benar-benar menjadi *rahmatn li al-'alamin*, bukan hanya sekedar goresan tinta di atas kumpulan kertas yang hanya memenuhi koleksi perpustakaan.

¹⁶ Pernyataan *vacum historis* ini terinspirasi oleh pandangan Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pemahaman selalu merupakan sesuatu yang bersifat historik dialektik dan sekaligus merupakan peristiwa kebahasaan. Sebagai hal yang bersifat historik, pemahaman sangat terkait dengan sejarah, dalam pengertian bahwa pemahaman itu merupakan fusi masa lalu dengan masa kini. Lihat: Lukman S. Thahir, “Memahami *Matn* Hadis Melalui Pendekatan Hermenetik”, *Hermeneia*, Vol. 1/ No. 1, Januari-Juni 2002, h. 50.

¹⁷ Kartini Kartono, *op.cit.*, h. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kandungan hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat?
2. Bagaimana hubungan antara kepemimpinan dan shalat yang dimaksud dalam hadis tersebut?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis terhadap realitas kekinian?

C. Definisi Operasional

Hadis adalah perkataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad saw. *Matn* adalah isi sebuah hadis sedangkan *Sanad* adalah rentetan para perawi hadis dari para sahabat Nabi sampai para Tabi'in yang mengeluarkan sebuah hadis.

Kata shalat adalah bentuk *ism masdar* dari *salla - yusalli - salah*. Kata shalat dari segi bahasa mempunyai arti beragam, yaitu doa, rahmat, ampunan, sanjungan Allah kepada Rasulullah saw., dan berarti ibadah yang di dalamnya terdapat rukuk dan sujud

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "pimpin" yang jika mendapat awalan "me" menjadi "memimpin" yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing.

Fiqhul hadist adalah suatu cabang dari ulumul hadis yang mana membicarakan tentang memahami suatu hadis.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kandungan hadis tentang Larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat, mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan shalat yang dimaksud hadis serta untuk mengetahui kontekstualisasi hadis itu terhadap realitas kekinian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberi pengertian kepada masyarakat Islam tentang bagaimana seharusnya ihwal seorang pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) yang sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui hadis Nabi. Di samping itu, penelitian ini diadakan untuk menambah khazanah keilmuan terutama di bidang *Ma'ani al-Hadis*.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kepemimpinan dan shalat memang cukup banyak. Akan tetapi, mayoritas dari tulisan-tulisan yang ada membahasnya secara terpisah. Adapun tulisan yang mengkajinya secara bersamaan, penyajian dalam pembahasan terlalu singkat dan kurang memadai.

Tulisan-tulisan tentang masalah kepemimpinan yang ditemukan, mayoritas membahas kepemimpinan dalam pemerintahan sebagai bagian dalam masalah negara. Masalah kepemimpinan yang diangkat dalam tulisan-tulisan ini dibahas secara umum saja. Berikut tulisan-tulisan yang membahas masalah kepemimpinan dan shalat.

Al-Nawawi, dalam kitab syarahnya terhadap *Sahih Muslim*, membahas hadis yang diteliti ini. Namun pembahasannya lebih mengarah kepada penjelasan

sanad. Adapun pada penjelasan *matmnya*, al-Nawawi hanya mengartikan kata *yusalluna* dengan doa.¹⁸ Jika dibandingkan dengan penjelasan hadis yang diberikan oleh Imam Muslim sendiri dalam kitab *Sahih*-nya, maka penjelasan Imam Muslim lebih lengkap.¹⁹

Karya Ali Ahmad al-Sulus yang berjudul *Imamah dan Khilafah*, memaparkan pemikiran-pemikiran tentang konsep Imamah dan khilafah menurut Jumah dan berbagai madzhab Islam serta perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah terhadap masalah ini.²⁰ Tidak terdapat pembahasan tentang kepemimpinan berdasarkan pemahaman hadis yang diteliti ini.

Sedangkan dalam *Imamah dan Khilafah* karya Murtadha Muthahhari memaparkan konsep imam dan khalifah yang cenderung berorientasi kepada ajaran Syi'ah. Menurut Syi'ah, kedudukan imam dan khalifah umat Islam hanya diberikan kepada Ali dan keturunannya berdasarkan hadis *Saqalain*, dan mereka maksum (terpelihara dari dosa dan kesalahan).²¹

Al-Mubarak dalam tulisannya yang berjudul *Nizam al-Islam: al-Mulk wa al-Daulah* menguraikan beberapa prinsip dan dasar Islam tentang pemerintahan dan pendirian negara berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.²² Di dalamnya juga mengulas masalah pemimpin pemerintahan.

Dalam buku *Islam and Government Sistem: Teaching, History and Reflection*

¹⁸ Al-Nawawi, *loc.cit.*

¹⁹ Muslim, *loc.cit.*

²⁰ Ali Ahmad al-Sulus, *Imamah dan Khalifah*, terj. Asmuni Sholihin Zamakhsyari (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 177.

²¹ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), h. 8-15.

²² Muhammad al-Mubarak, "*Nizam al-Islam: al-Mulk wa al-Daulah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 62-63.

yang ditulis oleh Munawir Sjadzali, membahas tentang hubungan antara Islam dan struktur negara (politik) yaitu pemerintahan dengan menengok bagaimana kepemimpinan dalam pemerintahan pada masa Nabi SAW., *Khulafa' al-Rasyidin* dan sesudahnya. Selain itu, buku ini membahas tokoh-tokoh ulama dan pemikirannya dalam masalah kepemimpinan dari zaman klasik hingga kontemporer.²³

Sedangkan dalam *Islam and Development : A Politico-Religious Response*²⁴ yang merupakan kumpulan tulisan oleh Sri Mulyati dkk. menengahkan berbagai pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang negara, politik dan perkembangan pergerakan-pergerakan di dunia dan di Indonesia.²⁴

Zainal Abidin Ahmad dalam tulisannya *Konsepsi Negara Bermoral menurut Imam al-Ghazali*, menengahkan teori-teori dan konsepsi-konsepsi kenegaraan menurut Imam al-Gazali yang bernuansa tasawuf. Dalam tulisan ini, hadis yang diteliti ini tercantum, namun dengan redaksi yang tidak lengkap disertai penjelasan hadis yang minim.²⁵

Adapun Fuad Mohammad Fachruddin dalam tulisannya *Pemikiran Politik Islam* sedikit menyinggung masalah hubungan antara shalat dan negara. Namun pembahasannya terlalu singkat dan hal inipun ditempatkan pada bab Pendahuluan tulisannya. Dalam pembahasan juga tidak menyinggung hadis yang diteliti ini.²⁶

²³ Munawir Sjadzali, *Islam and Government Sistem: Teaching, History and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Nederland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991), h. 1-2.

²⁴ Sri Mulyati (dkk.), *Islam and Development: A Politico-Religious Response* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. xvi-xxxii.

²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 157-158.

²⁶ Fuad Mohammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 16-17.

Ihwanuddin dalam skripsinya yang berjudul “Konsepsi Kepemimpinan dalam Sahih al-Bukhari : Kajian atas *Sanad* dan *Matn* Hadis” mengetengahkan pembahasan konsep kepemimpinan dari hadis-hadis tentang kepemimpinan yang terdapat dalam kitab *Sahih Bukhari*. Pembahasan ini meliputi penelitian terhadap *sanad* dan *matn* hadis. Ihwanuddin menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut sahih baik *sanad* maupun *matn*nya. Sedangkan kandungan dalam *matn*nya mengindikasikan bahwa rakyat harus taat kepada pemimpinnya dalam hal kebajikan dan amar ma’ruf. Apabila terdapat hal yang tidak menyenangkan dalam kepemimpinannya, maka rakyat harus bersabar tanpa membangkang.²⁷

Sedangkan Hendrik Imran dalam skripsinya “Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy : Studi Kritik *Sanad* dan *Matn*” membahas validitas hadis berdasarkan *sanad* dan *matn*nya, serta bagaimana makna yang dikandung hadis. Dalam pembahasannya ditemukan bahwa kepemimpinan dari suku Quraisy sama sekali tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan pimpinan negara yang diterapkan oleh Nabi saw. dan mengikat kepada umat secara permanen.²⁸

Hadari Nawawi dalam bukunya *Kepemimpinan Menurut Islam* hanya membahas masalah kepemimpinan Islam secara umum.²⁹ Sedangkan Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim dalam karyanya *Studi Kepemimpinan Islam : Telaah Normatif dan Historis* membahas pengertian kepemimpinan menurut

²⁷ Ihwanuddin, “Konsepsi Kepemimpinan dalam Sahih al-Bukhari : Kajian atas *Sanad* dan *Matn* Hadis”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, h. 67.

²⁸ Hendrik Imran, “Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy : Studi Kritik *Sanad* dan *Matn*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, h. 75.

²⁹ Hadari Nawawi, *op.cit.*, h. 41-42.

kacamata al-Qur'an dan hadis dan memahami konsep kepemimpinan melalui sejarah Islam yaitu mulai kepemimpinan Nabi saw., *Khulafa' al-Rasyidin* hingga Daulah Abbasiyyah.³⁰

Tulisan-tulisan di atas merupakan tulisan yang membahas masalah kepemimpinan. Adapun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan shalat adalah sebagai berikut.

Psikologi Shalat yang merupakan karya Sentot Haryanto membahas shalat dari segi sejarahnya, yaitu peristiwa Isra' Mi'raj yang pada saat itu kewajiban melaksanakan shalat bagi umat Islam langsung disampaikan Allah kepada Nabi saw. tanpa adanya perantara.³¹ Shalat juga dibahas dari segi psikologis dan religiusnya. Dalam pembahasan ini dikatakan bahwa shalat sangat berpengaruh positif bagi jiwa dan raga pelakunya serta mampu membentuk manusia yang bersih. Buku ini memaparkan pula bahwa di balik shalat berjama'ah mengandung keistimewaan terutama dalam terapi lingkungan dan kebersamaan.³²

Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya *Shalat Perdamaian : Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial* membahas shalat melalui pendekatan sufistik. Bagi Mahmud, shalat bukanlah sekedar gerakan, tapi juga pengetahuan dan sikap. Kedamaian di hati diwujudkan melalui shalat yang benar, sadar dan dewasa. Kedamaian di masyarakat pun diwujudkan melalui shalat. Shalat adalah refleksi, pengoyakan selubung yang menutupi mata dan hati. Implikasi dari

³⁰ Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam : Telaah Normatif dan Historis* (Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2001), h. 1-3.

³¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat: Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12.

³² *Ibid.*, h. 59-153.

pembahasan ini adalah untuk mewujudkan Islam yang hanif, toleran dan damai.³³

Casmini dalam artikelnya berjudul "Keistimewaan Shalat Ditinjau dari Aspek Psikologi dan Agama" mengungkapkan bahwa shalat selain menjadi barometer ketaatan dan penginsyafan seorang hamba pada Sang Khalik, juga mempunyai keistimewaan, yaitu pada peristiwa Isra' Mi'raj disampaikan perintah Allah kepada Nabi secara langsung tentang kewajiban shalat bagi kaum muslimin, dan keistimewaan shalat dalam melindungi jiwa agar senantiasa bersih dan suci.³⁴

Ahmad Fadhil Nasrullah dalam bukunya *Celaka Orang yang Shalat* hanya memaparkan penafsirannya tentang ayat-ayat al-Qur'an dalam surat *al-Ma'un* terutama pada ayat yang menyatakan : "celakalah orang-orang yang shalat".³⁵

Tulisan-tulisan tentang kepemimpinan dan shalat yang dikemukakan di atas tidak ada yang mengupas masalah kepemimpinan yang dikaitkan dengan shalat secara khusus, terlebih lagi penelitian atas hadis tentang seburuk-buruknya pemimpin selama menegakkan shalat. Adapun sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang korelasi antara kepemimpinan dan shalat yang merupakan sebuah kajian *ma'ani al-hadis* terhadap hadis yang bersangkutan belum diadakan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diadakan dan tulisan inilah sebagai realisasinya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan upaya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara

³³ Mahmud Muhammad Thaha, *Shalat Perdamaian: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. vi.

³⁴ Casmini, "Keistimewaan Shalat Ditinjau dari Aspek Psikologi dan Agama", *Hisbah*, Vol. 1/ No. 1, Januari-Desember 2002, h. 79-93.

³⁵ Ahmad Fadhil Nasrullah, *Celaka Orang yang Shalat* (Yogyakarta: Target Press, 2001), h. 3.

optimal.³⁶ Berikut penulis paparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan topik pembahasan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu data yang telah terkumpul diolah kemudian diuraikan secara obyektif untuk dianalisis secara konseptual dengan menggunakan metode *ma'ani al-hadis*, yakni pemaknaan dan interpretasi terhadap *matn* hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai kitab hadis, kitab syarah, kitab ilmu hadis, buku, artikel dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

4. Sumber Data

Setelah ditelusuri dalam kitab-kitab hadis dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*³⁷ melalui tema hadis dan *al-Mu'jam al-*

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Warsito, 1990), h. 30.

³⁷ A.J. Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah* (Beirut: Dar Ahya' al-Turas al-'Arabi, 2001), h. 55.

*Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*³⁸ melalui kata-kata dalam *matn* hadis dan dibantu penelusuran hadis melalui CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*³⁹ dengan metode penelusuran lewat topik atau tema hadis dan penelusuran lewat kata awal dalam *matn* hadis, hadis tentang Larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat terdapat dalam kitab *Sahih Muslim*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Sunan al-Darimi*. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketiga kitab ini. Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab hadis dan syarah hadis, buku, artikel dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan topik yang dibahas, untuk membantu dalam pemahaman hadis dan kontekstualisasinya.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang masih mentah. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisis data ini, langkah-langkah yang diambil penulis adalah sebagai berikut.⁴⁰

- a. Kritik Historis, yaitu analisis keotentikan hadis untuk menentukan validitas dan otentisitas hadis dari segi *sanad* dan *matn* dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

³⁸ A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, jilid VI (Leiden: E.J. Brill, 1967), h. 186.

³⁹ CD *Mausu'ah al-Hadis li Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Produksi Sakhr, tahun 1991, edisi 1.2.

⁴⁰ Langkah-langkah yang diambil ini merupakan metodologi sistematis hermeneutika yang ditawarkan oleh Musahadi HAM. Lihat: Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 155-159.

- b. Kritik Eidetis, yaitu berupa proses pemahaman yang memuat tiga langkah utama:
- 1) Analisis *matn*, yaitu menjelaskan makna hadis setelah ditetapkan derajat otentisitas hadis yang meliputi tiga tahap.
 - a) Kajian konfirmatif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema hadis, untuk memperoleh petunjuk di dalamnya.
 - b) Kajian Tematik Komprehensif, yakni mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
 - c) Kajian linguistik, berupa kajian terhadap teks hadis dengan menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab, misalnya menyangkut bentuk kata dan arti kata.
 - 2) Analisis realitas historis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problema historis ketika pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun mikro.
 - 3) Analisis Generalisasi, yaitu analisis untuk menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis.
- c. Kritik Praksis, yaitu menganalisis perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan saat ini, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan. Analisis tahap ini juga dikenal dengan nama kontekstualisasi hadis (proyeksi hadis) terhadap realitas kekinian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Sedangkan pada Bab II dibahas tentang konsep kepemimpinan dan shalat. Pembahasan ini mengulas pengertian tentang kepemimpinan dan shalat, yang akan memberi gambaran tentang topik kepemimpinan dan shalat, sebagai pegangan sebelum memasuki pembahasan berikutnya.

Pembahasan pada Bab III berupa interpretasi hadis sehingga kandungan hadis dapat dipahami secara tepat. Pembahasan ini meliputi tinjauan redaksional hadis-hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat. Dilanjutkan pada analisis keotentikan hadis dari segi *sanad* dan *matn*, analisis *matn* hadis meliputi kajian konfirmatif, kajian tematik-komprehensif, kajian linguistik dan kajian realitas-historis, dan diakhiri dengan generalisasi kandungan hadis.

Bab IV mengemukakan kontekstualisasi hadis terhadap realitas kekinian, yaitu berupa analisis perubahan makna hadis yang diperoleh dari generalisasi makna hadis ke dalam realitas kehidupan saat ini, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika politik dan kemasyarakatan.

Pembahasan dalam penelitian ini diakhiri dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atas

rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.